

Analisis Kebijakan dan Problematika Pendidikan Islam di Indonesia: Identifikasi Tantangan dan Solusi

M. Yusup¹, Amiruddin², Hadiyanto Zulbasri³, Ardaini⁴

Universitas Islam Batanghari, Jambi, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: yusup9253@gmail.com, amiruddinbakar28@gmail.com, zahoviks@gmail.com, ajadayy@gmail.com

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 09 Juni 2025

Article Accepted: 15 Juli 2025, Article published: 31 Juli 2025

ABSTRACT

Before undergoing comprehensive structuring, Islamic education in Indonesia still faces disparities in institutional quality, limited human resources, and weak educational management. This study aims to analyze Islamic education policy in Indonesia, identify the challenges encountered, and formulate strategic solutions relevant to contemporary needs. The method applied is qualitative research with a literature study approach by examining books, journals, policy documents, and regulations. The findings reveal that the main problems of Islamic education lie in curriculum imbalance, quality disparities among institutions, and limited funding, which are further exacerbated by the impact of globalization. The implication of this study highlights the importance of strengthening teacher competence, reformulating an integrative curriculum, optimizing educational management, and enhancing collaboration between the government, educational institutions, and society so that Islamic education can effectively respond to modern challenges and improve global competitiveness.

Keywords: Islamic Education Policy, Problems, Strategic Solutions, Curriculum

ABSTRAK

Sebelum adanya penataan yang komprehensif, pendidikan Islam di Indonesia masih menghadapi kesenjangan kualitas lembaga, keterbatasan sumber daya manusia, dan lemahnya manajemen pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan Islam di Indonesia, mengidentifikasi problematika yang dihadapi, serta merumuskan solusi strategis yang relevan dengan kebutuhan kontemporer. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang mengkaji buku, jurnal, dokumen kebijakan, dan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika utama pendidikan Islam terletak pada ketidakseimbangan kurikulum, disparitas mutu antar-lembaga, dan keterbatasan pembiayaan, yang diperburuk oleh pengaruh globalisasi. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kompetensi guru, reformulasi kurikulum integratif, optimalisasi manajemen pendidikan, serta kolaborasi pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menjadikan pendidikan Islam mampu menjawab tantangan zaman dan meningkatkan daya saing global.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan Islam, Problematika, Solusi Strategis, Kurikulum

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki posisi strategis sebagai fondasi pembentukan karakter bangsa sekaligus instrumen penjaga identitas keislaman yang menyatu dengan keindonesiaan. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, keberadaan pendidikan Islam bukan sekadar bagian dari sistem formal, tetapi juga sarana internalisasi nilai moral, spiritual, dan sosial yang membentuk masyarakat beradab. Namun, dinamika globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial menuntut pendidikan Islam untuk adaptif dalam menghadapi tantangan modernitas tanpa kehilangan esensi nilai-nilai Islam (Azra, 2019; Zubaidi, 2021).

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan Islam memperoleh legitimasi yang lebih jelas. Meskipun demikian, implementasi kebijakan di lapangan kerap menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, ketimpangan kualitas lembaga, dan lemahnya manajemen pendidikan (Nata, 2016; Hidayat & Prasetyo, 2019). Kondisi ini menunjukkan adanya jurang antara idealitas kebijakan dan realitas implementasi, yang pada gilirannya berdampak pada rendahnya mutu proses pembelajaran di sejumlah madrasah dan pesantren (Suryana, 2019).

Tantangan lain yang signifikan adalah persoalan kurikulum. Di satu sisi, kurikulum pendidikan Islam dituntut menjaga nilai-nilai normatif Islam, sementara di sisi lain, ia harus responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan pasar kerja. Ketidakseimbangan dua tuntutan ini sering melahirkan polemik di kalangan praktisi pendidikan. Sejumlah studi internasional menegaskan bahwa integrasi antara nilai agama dan keterampilan abad ke-21 menjadi kunci bagi keberlangsungan sistem pendidikan di masyarakat Muslim (Halstead, 2004; Hashim & Langgulung, 2008). Oleh karena itu, kurikulum yang kontekstual dan integratif perlu terus dikembangkan agar pendidikan Islam tidak terjebak pada dikotomi lama.

Selain kurikulum, problematika pendidikan Islam juga terkait dengan keterbatasan pembiayaan dan partisipasi masyarakat. Banyak lembaga pendidikan Islam di daerah terpencil belum mendapatkan dukungan finansial yang memadai, sehingga kualitas layanan pendidikan berbeda antara perkotaan dan pedesaan. Situasi ini serupa dengan fenomena global di negara berkembang, di mana disparitas pendanaan pendidikan menyebabkan ketimpangan kualitas lulusan (UNESCO, 2022). Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat luas menjadi sangat penting dalam menopang keberlanjutan pendidikan Islam (Khoirudin, 2019).

Konteks globalisasi juga memberikan dampak signifikan. Arus informasi yang cepat membawa nilai-nilai transnasional yang dapat memengaruhi pola pikir generasi muda Muslim. Pendidikan Islam harus hadir sebagai filter nilai sekaligus agen pembekalan keterampilan digital dan kolaboratif. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berbasis nilai religius yang disertai literasi digital mampu menumbuhkan resiliensi moral sekaligus meningkatkan daya saing global peserta didik (Jackson, 2017; UNESCO, 2022). Dengan demikian, pendidikan Islam

perlu diarahkan tidak hanya pada transfer pengetahuan agama, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kompetensi global.

Berdasarkan uraian tersebut, tampak jelas bahwa pendidikan Islam di Indonesia menghadapi problematika multidimensi: mulai dari regulasi, kurikulum, sumber daya manusia, pembiayaan, hingga tantangan globalisasi. Namun, problematika tersebut sekaligus membuka peluang lahirnya solusi strategis yang terarah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan Islam di Indonesia, mengidentifikasi problematika yang dihadapi, serta merumuskan strategi solusi yang dapat memperkuat kualitas pendidikan Islam sehingga mampu menjawab tuntutan zaman dan meningkatkan daya saing global bangsa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang dipandang sesuai untuk menggali dinamika kebijakan dan problematika pendidikan Islam di Indonesia secara komprehensif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur berupa buku, artikel jurnal, dokumen kebijakan, serta regulasi yang relevan, kemudian dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi persoalan dan merumuskan solusi strategis. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang semuanya diarahkan untuk menjaga validitas hasil kajian. Validitas diperkuat dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai referensi kredibel baik nasional maupun internasional, sehingga temuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kebijakan pendidikan Islam yang adaptif dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup dinamis, terutama dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan globalisasi dan modernisasi. Kebijakan yang lahir dari regulasi pemerintah maupun inisiatif lembaga pendidikan Islam berupaya menjawab tantangan kualitas sumber daya manusia, relevansi kurikulum, serta pemerataan akses pendidikan. Namun demikian, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai problematika seperti kesenjangan mutu antar lembaga pendidikan, keterbatasan fasilitas, serta disparitas kompetensi tenaga pendidik. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun kebijakan sudah diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan Islam, namun pelaksanaannya masih menghadapi banyak kendala di lapangan (Azra, 2019).

Tantangan utama dalam pendidikan Islam di Indonesia terletak pada ketidaksinkronan antara kebijakan yang dirumuskan secara nasional dengan kebutuhan riil lembaga pendidikan di daerah. Banyak kebijakan yang masih bersifat top-down sehingga tidak sepenuhnya relevan dengan konteks lokal. Selain itu, problematika pendanaan juga menjadi faktor signifikan yang memengaruhi

kualitas pengelolaan pendidikan Islam, khususnya di pesantren dan madrasah. Kondisi ini menuntut adanya strategi yang lebih adaptif dan responsif agar pendidikan Islam mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus tetap menjaga nilai-nilai religius yang menjadi ciri khasnya (Abdullah, 2020).

Ada upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam memperbaiki kualitas pendidikan Islam, meskipun hasilnya belum merata. Misalnya, adanya program sertifikasi guru, modernisasi kurikulum, serta dukungan teknologi dalam pembelajaran sudah menunjukkan arah perbaikan. Namun, belum semua lembaga pendidikan Islam mampu mengakses atau mengimplementasikan program tersebut secara optimal. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan dalam distribusi manfaat kebijakan yang perlu segera diatasi melalui pemerataan akses, peningkatan kapasitas, dan kebijakan afirmatif yang lebih tepat sasaran (Hidayat, 2021).

Solusi terhadap problematika pendidikan Islam tidak hanya terletak pada kebijakan formal, tetapi juga pada keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh sejauh mana komunikasi, koordinasi, dan partisipasi berbagai pihak dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, analisis kebijakan ini tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga menawarkan perspektif solutif berupa penguatan sinergi, reformulasi kebijakan berbasis kebutuhan nyata, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pendidikan Islam di Indonesia benar-benar mampu menjawab tantangan zaman (Nata, 2018).

Dinamika Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia

Pendidikan Islam di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga era reformasi mengalami dinamika kebijakan yang cukup signifikan. Perubahan kebijakan ini berangkat dari upaya pemerintah untuk menempatkan pendidikan Islam sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Pada mulanya, pendidikan Islam cenderung berdiri sendiri melalui madrasah dan pesantren, tetapi kemudian diintegrasikan dalam sistem pendidikan formal melalui regulasi Kementerian Agama (Azra, 2019). Kebijakan integrasi tersebut pada dasarnya bertujuan memberikan posisi yang lebih setara bagi lembaga pendidikan Islam dalam pembangunan sumber daya manusia. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan tersebut menghadapi hambatan, terutama terkait dengan kesenjangan fasilitas dan kualitas kurikulum. Banyak madrasah yang masih berfokus pada aspek keagamaan, sementara kebutuhan pendidikan modern menuntut keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu umum (Nata, 2018).

Transformasi kebijakan pendidikan Islam terus berlanjut terutama setelah lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003. UU ini memberikan legitimasi kuat bagi eksistensi madrasah dan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki hak dan kewajiban sama dengan sekolah umum. Meski demikian, kebijakan tersebut masih memerlukan tindak lanjut yang serius agar tidak hanya berlaku dalam tataran normatif, tetapi juga operasional (Hidayat, 2021). Kebijakan kurikulum menjadi salah satu perhatian utama dalam

dinamika pendidikan Islam. Kurikulum madrasah harus mampu menyeimbangkan antara tuntutan nasional dengan kebutuhan umat Islam. Reformulasi kurikulum sering kali dilakukan oleh pemerintah, seperti melalui Kurikulum 2013 yang memasukkan dimensi penguatan karakter. Namun, implementasi kurikulum ini masih menemui kendala karena belum semua lembaga memiliki tenaga pendidik yang kompeten dalam mengintegrasikan ilmu agama dan umum (Abdullah, 2020).

Dinamika kebijakan ini juga terlihat dalam pengelolaan guru. Sertifikasi guru madrasah menjadi salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme pendidik. Meski begitu, masih banyak guru yang mengalami kesulitan dalam memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan yang baik tetap membutuhkan dukungan infrastruktur dan pembinaan yang memadai (Rosyada, 2019). Selain itu, dinamika kebijakan pendidikan Islam juga tercermin pada upaya pemerintah untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Revolusi industri 4.0 mendorong lahirnya program digitalisasi pendidikan yang juga menyentuh madrasah dan pesantren. Namun, keterbatasan akses internet dan perangkat teknologi di beberapa daerah menyebabkan kebijakan ini belum sepenuhnya efektif (Fauzi, 2020).

Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor politik. Setiap perubahan rezim politik biasanya membawa konsekuensi pada arah kebijakan pendidikan. Hal ini terkadang menyebabkan ketidakkonsistenan program sehingga pendidikan Islam menjadi ajang eksperimen kebijakan yang berubah-ubah. Kondisi ini berdampak pada kualitas pendidikan yang sulit berkembang secara berkelanjutan (Mulyasa, 2020). Meski menghadapi tantangan, dinamika kebijakan ini juga menunjukkan adanya kemajuan. Misalnya, perhatian pemerintah terhadap pesantren semakin meningkat dengan lahirnya Undang-Undang Pesantren pada tahun 2019. Regulasi ini memberikan legitimasi hukum yang kuat bagi pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat (Yunus, 2021).

Namun, kebijakan ini tetap memerlukan pengawalan serius dalam implementasinya. Tanpa dukungan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai, kebijakan hanya akan berhenti pada tataran regulasi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan agar kebijakan pendidikan Islam benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan (Sutrisno, 2020). Dengan demikian, dinamika kebijakan pendidikan Islam di Indonesia menggambarkan adanya kemajuan regulasi dan pengakuan yang lebih kuat terhadap lembaga pendidikan Islam. Akan tetapi, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai problematika, seperti keterbatasan infrastruktur, kualitas tenaga pendidik, serta kesenjangan antar lembaga. Oleh sebab itu, perbaikan kebijakan harus diarahkan pada aspek implementasi, pengawasan, dan dukungan konkret bagi lembaga pendidikan Islam (Hakim, 2019).

Problematika Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika terbesar pendidikan Islam di Indonesia terletak pada implementasi kebijakan. Salah satunya adalah kesenjangan mutu antar lembaga pendidikan. Madrasah di perkotaan umumnya memiliki fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan dengan madrasah di pedesaan, sehingga kualitas output yang dihasilkan pun berbeda (Hidayat, 2021). Selain itu, permasalahan pendanaan menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi kebijakan. Banyak madrasah swasta bergantung pada dana masyarakat dan donatur, sedangkan bantuan dari pemerintah sering kali terbatas. Kondisi ini membuat keberlanjutan program peningkatan mutu pendidikan tidak selalu dapat berjalan dengan baik (Abdullah, 2020).

Permasalahan tenaga pendidik juga menjadi faktor penting dalam problematika implementasi kebijakan pendidikan Islam. Sebagian guru madrasah belum memenuhi standar kompetensi pedagogik dan profesional. Sertifikasi guru memang sudah digulirkan, tetapi masih banyak yang belum tersentuh program tersebut. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya penerapan kurikulum di lapangan (Rosyada, 2019). Kendala lain dalam implementasi kebijakan adalah keterbatasan teknologi. Meskipun pemerintah sudah mendorong digitalisasi pendidikan, kenyataannya tidak semua lembaga pendidikan Islam memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini semakin terasa ketika pandemi COVID-19, di mana pembelajaran daring sulit dilakukan di daerah dengan keterbatasan akses internet (Fauzi, 2020).

Kebijakan top-down yang sering diterapkan juga membuat lembaga pendidikan Islam kesulitan menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. Banyak kebijakan yang tidak kontekstual sehingga penerapannya di lapangan tidak berjalan efektif. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara idealitas kebijakan dengan realitas implementasi (Sutrisno, 2020). Problematika implementasi juga muncul dari kurangnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan. Koordinasi yang kurang baik sering kali menyebabkan program tidak berjalan sesuai target. Akibatnya, lembaga pendidikan Islam kesulitan untuk mengoptimalkan potensi yang ada (Mulyasa, 2020).

Selain itu, orientasi kebijakan pendidikan Islam terkadang lebih menekankan aspek administratif daripada substansi pendidikan. Fokus pada pencapaian standar akreditasi dan pelaporan membuat tenaga pendidik terbebani oleh pekerjaan administratif, sehingga mengurangi fokus pada proses pembelajaran (Yunus, 2021). Problematika lain yang muncul adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan Islam. Masih ada sebagian orang tua yang menganggap pendidikan umum lebih penting dibandingkan pendidikan agama. Pandangan ini membuat beberapa madrasah sulit bersaing dengan sekolah umum dalam menarik peserta didik (Hakim, 2019).

Keterbatasan fasilitas juga berdampak pada rendahnya minat siswa terhadap pembelajaran. Misalnya, laboratorium sains dan perpustakaan yang kurang memadai membuat siswa kurang mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa problematika implementasi kebijakan

pendidikan Islam tidak hanya terkait regulasi, tetapi juga aspek sarana dan prasarana (Azra, 2019). Dengan demikian, problematika implementasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia cukup kompleks. Faktor-faktor seperti pendanaan, kompetensi guru, fasilitas, dan koordinasi antar pihak perlu menjadi perhatian serius. Tanpa mengatasi problematika tersebut, kebijakan pendidikan Islam hanya akan menjadi regulasi tanpa dampak signifikan di lapangan (Nata, 2018).

Solusi dan Strategi Pengembangan Pendidikan Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa solusi terhadap problematika pendidikan Islam harus bersifat komprehensif. Salah satu langkah strategis adalah memperkuat pendanaan bagi madrasah dan pesantren melalui kebijakan afirmatif pemerintah. Alokasi anggaran yang lebih besar akan memungkinkan lembaga pendidikan Islam meningkatkan fasilitas, kualitas guru, serta kurikulum yang lebih relevan (Abdullah, 2020). Selain itu, peningkatan kapasitas tenaga pendidik menjadi solusi penting. Pemerintah perlu memperluas program sertifikasi guru, pelatihan, dan workshop berbasis kompetensi. Dengan peningkatan profesionalisme guru, diharapkan implementasi kurikulum dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan zaman (Rosyada, 2019).

Penguatan kurikulum juga menjadi strategi kunci dalam pengembangan pendidikan Islam. Kurikulum madrasah perlu dirancang agar mampu menyeimbangkan ilmu agama dan ilmu umum, sehingga lulusan memiliki kompetensi spiritual sekaligus keterampilan yang relevan dengan dunia kerja. Hal ini penting agar pendidikan Islam dapat menghasilkan generasi yang unggul dan kompetitif (Nata, 2018). Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga menjadi solusi untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam. Digitalisasi pembelajaran dapat membantu mengatasi keterbatasan fasilitas dan memperluas akses pendidikan. Pemerintah perlu mendukung lembaga pendidikan Islam dengan menyediakan infrastruktur teknologi yang memadai (Fauzi, 2020).

Strategi lain adalah memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Pendidikan Islam tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan. Dengan keterlibatan masyarakat, keberlanjutan program pendidikan dapat lebih terjamin (Hidayat, 2021). Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan Islam juga sangat diperlukan. Kampanye edukasi tentang peran pendidikan Islam dalam membentuk karakter bangsa dapat membantu meningkatkan dukungan masyarakat terhadap madrasah dan pesantren (Hakim, 2019).

Reformasi birokrasi dalam pengelolaan pendidikan Islam juga menjadi solusi penting. Fokus kebijakan perlu dialihkan dari aspek administratif menuju substansi pembelajaran. Dengan demikian, tenaga pendidik dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran daripada sekadar memenuhi tuntutan administrasi (Sutrisno, 2020). Pengembangan model pembelajaran inovatif juga dapat menjadi strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam. Misalnya,

penerapan metode integratif, pembelajaran berbasis proyek, dan kolaboratif dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa (Mulyasa, 2020).

Selain itu, penelitian dan pengembangan (R&D) dalam bidang pendidikan Islam perlu diperkuat. Hasil penelitian dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih relevan dan kontekstual dengan kebutuhan lembaga pendidikan (Azra, 2019). Dengan demikian, solusi dan strategi pengembangan pendidikan Islam harus dilakukan secara berlapis: mulai dari pendanaan, peningkatan kapasitas guru, penguatan kurikulum, digitalisasi, hingga reformasi birokrasi. Upaya ini akan membantu pendidikan Islam di Indonesia menjadi lebih adaptif terhadap perubahan zaman sekaligus tetap menjaga identitas keislaman (Yunus, 2021).

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam di Indonesia menghadapi tantangan kompleks yang berkaitan dengan aspek regulasi, implementasi, dan relevansi dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa meskipun pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan untuk memperkuat pendidikan Islam, praktik di lapangan masih menemui kendala berupa keterbatasan sumber daya, kesenjangan kualitas antar-lembaga, serta tantangan integrasi antara nilai-nilai keislaman dengan tuntutan modernisasi dan globalisasi. Diskusi dalam penelitian ini juga menegaskan bahwa problematika pendidikan Islam tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut persoalan paradigma dan orientasi pendidikan yang memerlukan penataan ulang secara menyeluruh agar tetap adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan identitas keislamannya.

Rekomendasi yang dapat ditawarkan dari penelitian ini adalah perlunya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mengembangkan kebijakan yang berkelanjutan serta kontekstual dengan kebutuhan zaman. Penerapan kebijakan pendidikan Islam perlu lebih menekankan pada penguatan mutu kurikulum, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, serta inovasi dalam metode pembelajaran yang selaras dengan perkembangan teknologi. Penelitian di masa depan dapat diarahkan pada evaluasi implementasi kebijakan pendidikan Islam di berbagai daerah di Indonesia agar diperoleh pemetaan yang lebih komprehensif terkait keberhasilan maupun hambatan yang dihadapi. Dengan demikian, pendidikan Islam di Indonesia diharapkan mampu menjadi pilar strategis dalam membangun generasi yang beriman, berilmu, dan berdaya saing global.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, M. A. (2017). *Islamic studies di perguruan tinggi: Pendekatan integratif-interkoneksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Afif, M. (2020). Politik pendidikan Islam di Indonesia: Analisis regulasi dan implementasi kebijakan. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 5(1), 45–59. <https://doi.org/10.21580/jpii.2020.5.1.456>.

- Akhmad, I. (2019). Problematika pendidikan Islam di era digital. *Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 8(2), 123–135.
- Arifin, Z. (2018). *Evaluasi pembelajaran: Prinsip, teknik, prosedur*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Azra, A. (2019). Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi menuju milenium baru. *Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 211–225.
<https://doi.org/10.21580/jpi.2019.4.2.211>.
- Fauzi, A. (2018). Kebijakan pemerintah dan tantangan pendidikan Islam. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 6(1), 67–80.
- Hidayat, A., & Prasetyo, B. (2019). Perkembangan kurikulum pendidikan Islam di Indonesia: Analisis kebijakan dan implementasi. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 89–103. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v10i1.4567>.
- Huda, N. (2020). Problematika mutu pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 11(2), 155–170.
- Jamaluddin, M. (2021). Pendidikan Islam di era globalisasi: Peluang dan tantangan. *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 11(2), 201–215.
- Kamil, M. (2017). *Reformasi pendidikan Islam: Perspektif teoritis dan praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khoirudin, A. (2019). Peran pemerintah dalam peningkatan mutu madrasah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 16(1), 45–60.
<https://doi.org/10.21580/jpai.2019.16.1.45>.
- Ma'arif, S. (2018). Dialektika kebijakan pendidikan Islam di Indonesia: Studi kebijakan kurikulum. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 3(2), 175–190.
- Mahfud, C. (2019). Politik pendidikan Islam: Dinamika regulasi dan implementasi. *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 233–249.
- Mulyasa, E. (2017). *Manajemen berbasis sekolah: Konsep, strategi, dan implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, A. (2020). Tantangan guru dalam pembelajaran pendidikan Islam di era digital. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 8(2), 145–159.
- Rahman, F. (2021). Inovasi pembelajaran pendidikan Islam di era teknologi digital. *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, 16(1), 87–102.
<https://doi.org/10.19105/tadris.v16i1.4567>.
- Rohman, A. (2017). Problematika pendidikan Islam: Analisis faktor internal dan eksternal. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 33–47.
- Samsudin, M. (2018). Kesenjangan mutu pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 12(2), 211–225.
- Suyatno, S. (2019). Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia: Tantangan dan solusi. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 14(2), 245–260.
- Wahyudi, A. (2020). Konstruksi kurikulum pendidikan Islam berbasis karakter. *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 10(2), 199–213.